

ASEAN Centrality dan Posisi Indonesia

dalam Arsitektur Indo-Pasifik Baru

Oleh: Rudy C Tarumingkeng



*Rudy C Tarumingkeng: ASEAN Centrality dan Posisi Indonesia dalam
Arsitektur Indo-Pasifik Baru*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan
Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari)

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

12 Maret 2026

ASEAN CENTRALITY DAN POSISI INDONESIA DALAM ARSITEKTUR INDO-PASIFIK BARU

1. Pendahuluan

Perdebatan tentang **ASEAN Centrality** menjadi semakin penting justru ketika Indo-Pasifik berubah menjadi panggung utama kompetisi geopolitik, konektivitas ekonomi, perlombaan teknologi, dan keamanan maritim. Kawasan ini bukan lagi sekadar label geografis yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik, tetapi arena tempat strategi Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, India, Australia, Uni Eropa, Quad, AUKUS, dan berbagai pengaturan ekonomi baru saling bertemu, tumpang tindih, bahkan bersaing. Di tengah lanskap seperti itu, ASEAN berusaha mempertahankan posisi bukan sebagai penonton, melainkan sebagai **pusat pengatur ritme dialog regional**. Dokumen resmi *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) menegaskan bahwa ASEAN Centrality adalah prinsip dasar untuk memajukan kerja sama di Indo-Pasifik, dengan mekanisme yang dipimpin ASEAN—seperti *East Asia Summit*—sebagai platform dialog dan implementasi kerja sama. ([ASEAN](#))

Masalahnya, pengakuan normatif atas centrality tidak otomatis berarti efektivitas strategis. AOIP menekankan Indo-Pasifik sebagai kawasan dialog dan kerja sama, bukan rivalitas, dan membayangkan ASEAN memainkan peran sentral dan strategis dalam kawasan yang saling terhubung. Namun realitas 2025–2026 menunjukkan bahwa ASEAN harus bergerak di tengah minilateral security arrangements seperti AUKUS dan Quad, kompetisi AS–Tiongkok yang makin tajam, krisis

Myanmar yang belum terselesaikan, dan isu Laut Cina Selatan yang terus menguji kemampuan ASEAN menjaga kohesi. Karena itu, pertanyaan yang lebih tepat bukan apakah ASEAN Centrality masih relevan, tetapi **sejauh mana ia masih mampu membentuk arsitektur kawasan yang sedang berubah cepat.** ([ASEAN](#))

Dalam konteks itulah posisi Indonesia menjadi sangat penting. Indonesia bukan hanya anggota terbesar ASEAN secara politik dan strategis, tetapi juga penggagas utama AOIP dan salah satu pendorong paling konsisten agar Indo-Pasifik tidak direduksi menjadi arena kontestasi blok. Pemerintah Indonesia pada 2025 masih secara eksplisit menegaskan bahwa Indonesia adalah penggagas dan pendorong utama AOIP di ASEAN, sementara kesinambungan kebijakan di bawah Presiden Prabowo juga terlihat dari penegasan bahwa Indo-Pasifik yang damai, terbuka, dan sejahtera harus dibangun dengan ASEAN sebagai pusatnya. Dengan demikian, ketika membahas ASEAN Centrality, kita pada saat yang sama sedang membahas **peran Indonesia sebagai penjaga, penerjemah, dan penggerak konsep itu.** ([Kemlu](#))

2. Apa yang Dimaksud dengan ASEAN Centrality?

Secara konseptual, ASEAN Centrality bukan sekadar slogan diplomatik. Ia adalah klaim bahwa arsitektur kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik seharusnya dibangun melalui mekanisme yang dipimpin ASEAN, dengan prinsip keterbukaan, inklusivitas, penghormatan terhadap hukum internasional, dan penolakan terhadap politik blok yang eksklusif. AOIP 2019 menyatakan bahwa ASEAN memainkan peran "central and strategic role," memandang Indo-Pasifik sebagai kawasan yang terintegrasi dan saling terhubung, serta menegaskan bahwa tujuan utamanya adalah mendukung perdamaian, stabilitas, kemakmuran, dan kepercayaan melalui penguatan mekanisme ASEAN-led seperti EAS, ARF, ADMM-Plus, dan Expanded ASEAN Maritime Forum. AOIP juga menekankan prinsip

keterbukaan, transparansi, inklusivitas, kerangka berbasis aturan, penghormatan terhadap kedaulatan, non-intervensi, dan penghormatan terhadap UNCLOS 1982. ([ASEAN](#))

Dari sudut pandang institusional, centrality berarti dua hal sekaligus. Pertama, ASEAN ingin tetap menjadi **convening power**—pihak yang mengumpulkan aktor-aktor besar dan menengah dalam forum yang relatif netral. Kedua, ASEAN ingin menjadi **norm-setting centre**—pihak yang setidaknya ikut menetapkan bahasa, prinsip, dan prosedur interaksi kawasan. Inilah sebabnya ASEAN tidak hanya berbicara tentang hasil, tetapi juga sangat menekankan format, forum, dan prinsip. Dalam logika ASEAN, siapa yang memimpin meja perundingan sangat penting, karena dari situlah dibangun peluang untuk mengelola rivalitas agar tidak langsung berubah menjadi konflik terbuka. Deklarasi ASEAN 2024 tentang AOIP untuk “future-ready ASEAN and ASEAN-centred regional architecture” menegaskan kembali bahwa ASEAN bertekad membentuk dan memimpin arsitektur kawasan yang berevolusi, memastikan pergeseran geopolitik tidak merusak perdamaian dan stabilitas, dan menempatkan Centrality sebagai prinsip fundamental kerja sama Indo-Pasifik. ([ASEAN](#))

Akan tetapi, centrality versi ASEAN berbeda dari dominasi. ASEAN tidak pernah mengklaim dirinya sebagai hegemon kawasan. Sebaliknya, ia menempatkan diri sebagai titik temu yang memungkinkan negara-negara dengan orientasi strategis berbeda tetap duduk dalam satu ruang. Justru karena ASEAN bukan kekuatan militer dominan, legitimasi centrality bergantung pada kemampuannya menyediakan *platform* yang dianggap cukup berguna oleh semua pihak. Inilah kekuatan sekaligus kelemahannya: ASEAN relatif bisa diterima banyak pihak karena tidak terlalu mengancam, tetapi juga mudah diabaikan jika forum-forumnya tidak cukup menghasilkan keluaran yang konkret. Ketuaaan ASEAN 2025

dan dokumen *ASEAN 2045: Our Shared Future* sendiri mengakui tantangan ini dengan menekankan bahwa ASEAN harus tetap menjadi “locomotive for peace, stability and prosperity,” merespons lingkungan geopolitik Indo-Pasifik yang semakin kompleks, dan memperkuat centrality dalam hubungan eksternalnya. ([ASEAN](#))

3. Mengapa Indo-Pasifik Membuat Centrality Semakin Penting?

Indo-Pasifik menjadi penting karena di situlah jalur perdagangan utama dunia, chokepoints maritim, rantai pasok strategis, transisi energi, dan keamanan kawasan bertemu. Bagi ASEAN, kawasan ini bukan sekadar ruang eksternal, melainkan lingkungan strategis langsung. AOIP sejak awal menyebut pentingnya domain maritim, konektivitas, SDGs, dan kerja sama ekonomi sebagai empat prioritas utama, yang berarti ASEAN melihat Indo-Pasifik bukan hanya dari kacamata keamanan, tetapi juga dari sudut pembangunan dan konektivitas. Pandangan ini penting karena membedakan AOIP dari banyak strategi Indo-Pasifik lain yang lebih tebal nuansa kompetisi kekuatan besarnya. ([ASEAN](#))

Kebutuhan akan centrality juga menguat karena banyak arsitektur baru lahir di luar mekanisme ASEAN. Quad Foreign Ministers’ Meeting 2024 menegaskan dukungan pada “ASEAN’s unity and centrality” dan mendukung implementasi praktis AOIP, tetapi keberadaan Quad sendiri menunjukkan bahwa koordinasi strategis penting kini juga berlangsung dalam format minilateral non-ASEAN. Demikian pula AUKUS, yang secara resmi didefinisikan sebagai kemitraan keamanan trilateral Australia–Inggris–Amerika Serikat untuk mendukung Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, damai, aman, dan stabil. Dalam arti institusional, ini berarti keamanan Indo-Pasifik tidak lagi bergantung hanya pada forum ASEAN-led; ada lapisan-lapisan pengaturan baru yang bergerak dengan logika, kecepatan, dan kepentingan sendiri. ([DFAT](#))

Di sisi ekonomi, tekanan agar ASEAN tetap sentral juga datang dari perubahan pola integrasi kawasan. ASEAN Statistical Highlights 2025 menunjukkan bahwa total perdagangan barang ASEAN pada 2024 mencapai sekitar **US\$3,8 triliun**, dengan ekspor **US\$1,95 triliun**, impor **US\$1,89 triliun**, dan porsi perdagangan intra-ASEAN sekitar **21,4 persen**. Ini menunjukkan bahwa ASEAN bukan sekadar ruang transit geopolitik, tetapi sebuah pusat ekonomi yang besar. Pada saat yang sama, dokumen ASEAN 2024 tentang AOIP menegaskan dukungan pada implementasi RCEP, penguatan rantai pasok global yang terbuka dan nondiskriminatif, serta konektivitas di dalam dan melampaui kawasan. Jadi, centrality juga berarti kemampuan menjaga agar ASEAN tidak menjadi objek perebutan, melainkan tetap menjadi *hub* ekonomi dan normatif bagi arsitektur Indo-Pasifik. ([ASEANstats Official Web Portal](#))

4. AOIP sebagai Jawaban ASEAN terhadap Arsitektur Indo-Pasifik Baru

AOIP sesungguhnya adalah jawaban politik ASEAN terhadap fakta bahwa istilah "Indo-Pacific" tidak bisa lagi dihindari. Ketika berbagai kekuatan besar mulai memopulerkan istilah itu dengan tekanan kuat pada strategi, keamanan, dan persaingan, ASEAN memilih untuk tidak menolak istilahnya, tetapi **merebut maknanya**. AOIP menekankan bahwa Indo-Pasifik harus dipahami sebagai kawasan dialog dan kerja sama, bukan rivalitas; bahwa kerja sama harus memperkuat mekanisme yang sudah ada; dan bahwa isu maritim, konektivitas, pembangunan berkelanjutan, dan ekonomi harus menjadi pintu masuk utama. Dengan kata lain, AOIP adalah upaya ASEAN untuk mengubah bahasa strategis yang berpotensi eksklusif menjadi kerangka yang lebih inklusif. ([ASEAN](#))

Perkembangan setelah 2019 menunjukkan bahwa AOIP tidak berhenti sebagai dokumen konseptual. Deklarasi ASEAN 2024 tentang AOIP untuk *future-ready ASEAN* secara khusus meminta penguatan centrality

melalui diskusi strategis di mekanisme ASEAN-led, mendorong implementasi dan mainstreaming AOIP melalui *workstreams*, proyek konkret, dan kegiatan seperti ASEAN-Indo-Pacific Forum, AOIP Forum menuju SDGs 2030, ASEAN SHIELD, *Task Force on Blue Economy*, dan publikasi *ASEAN Maritime Outlook*. Deklarasi itu juga mengaitkan AOIP secara eksplisit dengan ASEAN Community Vision 2045, RCEP, konektivitas, keamanan maritim, digital transformation, ketahanan pangan, dan energi. Ini memperlihatkan bahwa AOIP makin diperlakukan sebagai **kerangka operasional**, bukan hanya narasi normatif. (ASEAN)

Lebih jauh, *Chairman's Statement* KTT ASEAN ke-47 pada November 2025 menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat centrality dalam arsitektur kawasan yang terbuka, transparan, inklusif, dan berbasis aturan, serta menyebut bahwa makin banyak mitra eksternal ASEAN menyatakan dukungan pada AOIP melalui pernyataan bersama dan inisiatif konkret. Pada saat yang sama, para pemimpin ASEAN mendorong semua mitra untuk terus mengembangkan proyek dan kegiatan nyata dalam empat area prioritas AOIP melalui mekanisme yang dipimpin ASEAN. Fakta ini penting karena menunjukkan dua hal: pertama, AOIP telah memperoleh legitimasi diplomatik yang luas; kedua, tantangan berikutnya adalah memastikan dukungan itu benar-benar diterjemahkan ke dalam proyek, bukan hanya frasa sopan dalam komunikasi bersama. (ASEAN)

5. Mengapa ASEAN Centrality Tetap Diuji?

Meskipun diakui luas, centrality ASEAN tidak pernah otomatis. Ujian pertama datang dari **minilateralism**. AUKUS dan Quad sama-sama mengklaim tujuan stabilitas Indo-Pasifik, dan beberapa mitra besar menyatakan dukungan verbal pada ASEAN centrality. Amerika Serikat dalam *ASEAN–United States Leaders' Joint Vision Statement 2025* menegaskan dukungan pada ASEAN Centrality dan menyebut AOIP

sebagai kerangka di mana ASEAN memainkan peran memimpin bagi perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kemakmuran kawasan yang lebih luas. Jepang pada 2025 juga menegaskan dukungan kuat terhadap ASEAN Centrality dan *ASEAN Community-building*, sedangkan komunikasi Indonesia–Australia 2025 bahkan menyambut dukungan Quad terhadap centrality dan AOIP. Tetapi justru di sinilah paradoksnya: semakin sering centrality diakui secara verbal oleh aktor-aktor luar, semakin terlihat bahwa agenda keamanan dan teknologi utama juga berjalan di jalur paralel yang tidak dikendalikan ASEAN. ([ASEAN](#))

Ujian kedua datang dari **divergensi internal ASEAN**. ASEAN adalah organisasi yang berhasil karena konsensus, tetapi mekanisme konsensus juga membuatnya lambat dalam isu yang sangat politis. Krisis Myanmar adalah contoh paling jelas. Dalam *Chairman's Statement* KTT ASEAN ke-47, para pemimpin masih harus menyerukan penghentian segera kekerasan tanpa pandang bulu, perlindungan warga sipil, dan penciptaan lingkungan yang kondusif bagi dialog nasional yang inklusif. Fakta bahwa seruan itu tetap diperlukan pada akhir 2025 menunjukkan bahwa centrality ASEAN secara normatif masih ada, tetapi kapasitas implementatifnya terhadap konflik intra-kawasan tetap terbatas. Ini bukan sekadar masalah Myanmar; ini menyangkut kredibilitas ASEAN sebagai aktor keamanan regional. ([ASEAN](#))

Ujian ketiga datang dari **Laut Cina Selatan**. KTT ASEAN ke-47 juga menegaskan kembali pentingnya perdamaian, keamanan, stabilitas, keselamatan, dan kebebasan navigasi serta overflight di Laut Cina Selatan, sambil mendukung implementasi penuh DOC dan menyambut kemajuan perundingan. Namun, pengulangan rumusan-rumusan ini dari tahun ke tahun juga memperlihatkan bahwa ASEAN masih berjuang menjaga satu suara yang cukup tegas di tengah perbedaan tingkat kedekatan tiap anggota dengan Tiongkok, perbedaan kepentingan

maritim, dan sensitivitas strategis terhadap Amerika Serikat. Dalam isu seperti ini, centrality diuji bukan oleh ketiadaan forum, melainkan oleh kemampuan menghasilkan posisi kolektif yang operasional. ([ASEAN](#))

Ujian keempat adalah **kesenjangan antara norma dan eksekusi**. AOIP sejak awal kaya prinsip, tetapi para pengkritiknya kerap mempertanyakan seberapa konkret implementasinya. Menariknya, bahkan tulisan resmi di lingkungan pemerintah Indonesia pada 2023 mengakui bahwa banyak pihak mengkhawatirkan AOIP belum cukup spesifik dalam implementasi, dan karena itu AIPF dirancang sebagai salah satu bentuk implementasi konkret untuk memperkuat kesatuan dan kepemimpinan ASEAN melalui kerja sama yang saling menguntungkan. Ini adalah pengakuan yang jujur: centrality tidak akan bertahan lama bila hanya menjadi bahasa diplomatik tanpa proyek yang dapat dirasakan manfaatnya oleh negara anggota maupun mitra. ([Sekretariat Kabinet Republik Indonesia](#))

6. Posisi Indonesia: Penggagas, Penjaga, dan Penerjemah AOIP

Posisi Indonesia di sini sangat menentukan karena Indonesia adalah negara yang paling konsisten mendorong agar ASEAN tidak kehilangan posisi sentralnya dalam pembentukan Indo-Pasifik. Sejak sebelum AOIP diadopsi, pemerintah Indonesia sudah menekankan bahwa kerja sama Indo-Pasifik harus inklusif dan menjaga centrality ASEAN. Setelah AOIP lahir, pemerintah Indonesia masih pada 2025 menegaskan dirinya sebagai penggagas dan pendorong utama AOIP di ASEAN. Artinya, bagi Jakarta, centrality bukan sekadar kepentingan ASEAN secara umum, tetapi juga bagian dari strategi Indonesia untuk menjaga agar kawasan sekitar tidak dibentuk sepenuhnya oleh logika kekuatan besar. ([Kemlu](#))

Peran itu menjadi sangat nyata pada saat Indonesia memegang Keketuaan ASEAN 2023. Pemerintah Indonesia meluncurkan **ASEAN-**

Indo-Pacific Forum (AIPF) sebagai salah satu *highlight* keketuaannya, dengan tema implementasi AOIP. Presiden Jokowi menyatakan forum itu hadir untuk mengubah rivalitas di Indo-Pasifik menjadi kerja sama yang bermanfaat, membangun *habit of cooperation* yang *win-win*, dan tidak mengucilkan pihak mana pun. Forum itu diarahkan pada tiga agenda utama: infrastruktur hijau dan rantai pasok yang tangguh, pembiayaan berkelanjutan dan inovatif, serta transformasi digital dan ekonomi kreatif. Bahkan, dokumen resmi Setkab mencatat forum itu menghasilkan 93 proyek senilai US\$38,2 miliar dan 73 proyek potensial lain senilai US\$17,8 miliar. Terlepas dari realisasi akhirnya yang tentu perlu dipantau, langkah ini penting karena menunjukkan bahwa Indonesia berusaha menerjemahkan centrality ke dalam *deliverables*. ([Sekretariat Kabinet Republik Indonesia](#))

Kontinuitas peran Indonesia juga tampak di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Pada *Annual Leaders' Meeting* Indonesia–Australia 2025, kedua pemimpin menegaskan pentingnya membangun Indo-Pasifik yang damai, stabil, makmur, berbasis aturan, dengan ASEAN di pusatnya, serta menyambut dukungan Quad atas centrality dan AOIP. Di KTT ASEAN–Amerika Serikat 2025, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kemitraan strategis ASEAN–AS untuk mewujudkan Indo-Pasifik yang damai, terbuka, dan sejahtera. Ini menunjukkan bahwa meskipun gaya diplomasi bisa berubah, garis besar posisi Indonesia tampak tetap: menjadikan ASEAN sebagai jangkar utama ketika Jakarta berhadapan dengan mitra besar. ([Kemlu](#))

Secara strategis, posisi Indonesia dapat dibaca dalam tiga lapisan. Pertama, Indonesia bertindak sebagai **norm entrepreneur**, yaitu pihak yang membantu membentuk bahasa kawasan melalui AOIP. Kedua, Indonesia berfungsi sebagai **bridge-builder**, karena ia cukup diterima oleh berbagai pihak—Amerika Serikat, Jepang, Australia, Tiongkok, India,

dan juga mitra Global South—untuk mendorong format kerja sama yang tidak langsung bersifat blok. Ketiga, Indonesia berperan sebagai **implementation broker**, karena tanpa inisiatif konkret seperti AIPF, blue economy, rantai pasok tangguh, transisi energi, dan pembayaran lintas batas, centrality mudah terjebak menjadi retorika. Dalam arti ini, posisi Indonesia bukan sekadar posisi terbesar di ASEAN, melainkan posisi yang menanggung beban paling besar untuk menjaga relevansi ASEAN itu sendiri. ([Sekretariat Kabinet Republik Indonesia](#))

7. Indonesia dalam Arsitektur Indo-Pasifik Baru: Peluang Strategis

Arsitektur Indo-Pasifik baru membuka peluang yang cukup besar bagi Indonesia. Peluang pertama adalah sebagai **penjembatan antara berbagai strategi Indo-Pasifik**. Banyak mitra eksternal kini menyatakan dukungan terhadap AOIP. Amerika Serikat pada 2025 memasukkan ASEAN centrality dan AOIP ke dalam *Joint Vision Statement* dengan ASEAN; Jepang pada 2025 kembali menegaskan dukungan kuat terhadap centrality ASEAN; dan Quad pada 2024 juga menyatakan dukungan tegas terhadap unity and centrality ASEAN serta implementasi praktis AOIP. Secara diplomatik, ini memberikan ruang bagi Indonesia untuk mendorong **konvergensi**—bukan penyeragaman total, tetapi titik temu praktis antara berbagai strategi eksternal dengan prinsip-prinsip AOIP. ([ASEAN](#))

Peluang kedua adalah dalam **arsitektur ekonomi dan konektivitas**. AOIP 2024 secara eksplisit mengaitkannya dengan RCEP, rantai pasok global yang terbuka dan nondiskriminatif, transformasi digital yang inklusif, konektivitas kawasan, ketahanan pangan, dan energi. ASEAN sendiri pada 2024 mencatat perdagangan barang sekitar US\$3,8 triliun, sehingga integrasi ekonomi bukan isu marginal. Bagi Indonesia, ini berarti posisi strategisnya dapat diperkuat jika mampu menghubungkan centrality ASEAN dengan agenda konkret seperti

downstreaming industri, kendaraan listrik, konektivitas maritim, transisi energi, dan ekosistem pembayaran regional. Dengan kata lain, posisi Indonesia akan makin kuat bila ia membuat AOIP terlihat relevan bagi investasi, perdagangan, dan supply chain, bukan hanya bagi diplomat. [\(ASEAN\)](#)

Peluang ketiga adalah pada **isu maritim dan hukum internasional**. AOIP sejak 2019 menempatkan domain maritim sebagai elemen penting, dan dokumen-dokumen ASEAN berikutnya terus menegaskan dukungan pada UNCLOS 1982, penyelesaian sengketa secara damai, serta stabilitas maritim. Bagi Indonesia—negara kepulauan terbesar dan aktor penting di jalur laut strategis—ini memberi legitimasi kuat untuk memosisikan diri sebagai advokat utama tata kelola maritim yang inklusif dan berbasis aturan. Apalagi, *ASEAN Leaders' Declaration on AOIP 2024* juga menyebut penguatan *ASEAN Maritime Outlook, Blue Economy Task Force*, dan kerja sama maritim sebagai bagian dari mainstreaming AOIP. [\(ASEAN\)](#)

Peluang keempat adalah pada **penguatan ASEAN-led development agenda**. *ASEAN 2045: Our Shared Future* dan KTT ASEAN ke-47 menekankan bahwa ASEAN harus menjadi lokomotif perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran, serta memperkuat centrality sambil memperdalam perdagangan, investasi, konektivitas, digital transformation, dan pengurangan development gap. Indonesia dapat memanfaatkan kerangka ini untuk mendorong centrality yang lebih substantif: bukan sekadar mengelola persaingan kekuatan besar, tetapi juga memastikan bahwa ASEAN tetap relevan bagi isu-isu seperti digital economy, energy grid integration, food security, dan pembangunan sub-regional. Dalam dunia yang semakin geoekonomis, centrality akan jauh lebih kuat bila ditopang oleh agenda pembangunan yang nyata. [\(ASEAN\)](#)

8. Tetapi Ada Juga Risiko Besar bagi Indonesia

Namun posisi Indonesia juga tidak bebas dari risiko. Risiko pertama adalah **terlalu mengandalkan centrality sebagai prinsip diplomatik tanpa memperkuat mesin kelembagaannya**. ASEAN Secretariat tetap relatif kecil dibanding beban isu yang harus ditangani. Deklarasi AOIP 2024 sendiri memasukkan penguatan kapasitas kelembagaan ASEAN dan Secretariat sebagai salah satu poin penting. Ini berarti ASEAN menyadari bahwa centrality memerlukan institusi yang lebih kuat, lebih cepat, dan lebih mampu mengoordinasikan implementasi lintas sektor. Jika tidak, Indonesia akan terus bekerja keras menghasilkan gagasan, tetapi kapasitas kelembagaan ASEAN untuk mengeksekusinya tetap tertinggal. ([ASEAN](#))

Risiko kedua adalah **ketegangan antara inklusivitas dan ketegasan**. Indonesia dan ASEAN sama-sama menekankan keterbukaan, non-eksklusivitas, dan kerja sama, tetapi kawasan juga menghadapi isu-isu yang menuntut posisi lebih tegas: Laut Cina Selatan, Myanmar, proliferasi teknologi militer, dan kejahatan lintas negara. Jika terlalu normatif, ASEAN bisa dinilai lunak. Jika terlalu tegas, ia bisa pecah secara internal. Bagi Indonesia, tantangan besarnya adalah menjaga keseimbangan: cukup inklusif untuk tetap memelihara forum yang luas, tetapi cukup tegas untuk menjaga kredibilitas hukum dan stabilitas kawasan. *Chairman's Statement* KTT ASEAN ke-47 memperlihatkan bahwa kebutuhan akan ketegasan itu nyata, baik dalam isu Myanmar maupun Laut Cina Selatan. ([ASEAN](#))

Risiko ketiga adalah **terdesaknya ASEAN oleh kecepatan minilateralism**. Format seperti AUKUS dan Quad bergerak lebih cepat karena anggotanya lebih sedikit dan kepentingannya lebih terkonsentrasi. ASEAN unggul dalam legitimasi, tetapi tidak selalu unggul dalam kecepatan. Bila Indonesia tidak berhasil mendorong AOIP

ke arah proyek yang konkret, para aktor eksternal bisa makin melihat ASEAN sebagai forum normatif, sementara keputusan strategis substantif justru dibuat di luar ASEAN. Dalam jangka panjang, ini bukan berarti ASEAN hilang, tetapi centrality-nya bisa menyusut menjadi sekadar *convening ritual*. ([U.S. Department of War](#))

Risiko keempat adalah **perbedaan orientasi antaranggota ASEAN**. Beberapa negara lebih nyaman memperkuat hubungan keamanan dengan Amerika Serikat dan mitra Barat; yang lain sangat bergantung secara ekonomi pada Tiongkok; yang lain lagi lebih menekankan netralitas atau hedging. Dalam situasi seperti itu, Indonesia harus terus menjalankan fungsi *internal balancer* di dalam ASEAN sendiri. Jika Indonesia gagal memelihara kohesi intra-ASEAN, maka posisi ASEAN dalam arsitektur Indo-Pasifik akan makin mudah ditentukan oleh aktor luar. Karena itu, posisi Indonesia di Indo-Pasifik baru tidak dapat dipisahkan dari kemampuannya membangun konsensus di dalam ASEAN terlebih dahulu. ([ASEAN](#))

9. Apa yang Perlu Dilakukan Indonesia?

Ke depan, ada beberapa agenda strategis yang tampaknya penting bila Indonesia ingin memastikan ASEAN Centrality tetap relevan.

Pertama, Indonesia perlu terus mendorong **mainstreaming AOIP** ke dalam seluruh mekanisme ASEAN-led. Deklarasi 2024 sudah memberi landasan dengan menghubungkan AOIP ke RCEP, konektivitas, maritim, blue economy, SDGs, food security, digital transformation, dan institutional capacity. Tantangannya sekarang adalah memastikan bahwa setiap KTT, setiap pertemuan sektoral, dan setiap kerja sama dengan mitra eksternal memiliki benang merah AOIP yang jelas. Dengan begitu, AOIP tidak diperlakukan sebagai dokumen samping, tetapi sebagai kerangka payung. ([ASEAN](#))

Kedua, Indonesia perlu memperkuat **mekanisme implementasi konkret**, bukan hanya produksi pernyataan bersama. Pengalaman AIPF 2023 menunjukkan bahwa Indonesia mampu menghubungkan AOIP dengan agenda yang nyata: green infrastructure, resilient supply chains, sustainable financing, digital transformation, dan creative economy. Model seperti ini perlu diteruskan, diperbaiki, dan diinstitusionalisasikan lintas ketuaan ASEAN, sehingga AOIP memiliki portofolio proyek yang dapat diukur. Bila proyek konkret terus bertambah, centrality ASEAN akan memiliki dasar material yang lebih kuat. ([Sekretariat Kabinet Republik Indonesia](#))

Ketiga, Indonesia perlu menjadikan centrality tidak hanya sebagai **konsep eksternal**, tetapi juga sebagai **program penguatan internal ASEAN**. Ini berarti mendorong penyempitan development gap, memperkuat kapasitas Timor-Leste menuju keanggotaan penuh, memperdalam intra-ASEAN trade and investment, dan meningkatkan kapasitas Secretariat. KTT ASEAN ke-47 menekankan penguatan konektivitas, digital transformation, dan pengurangan development gap sebagai bagian dari komitmen terhadap ekonomi regional yang terintegrasi dan tangguh. Tanpa basis internal yang lebih solid, centrality akan sulit bertahan dalam tekanan eksternal yang makin keras. ([ASEAN](#))

Keempat, Indonesia perlu mengembangkan **strategi konvergensi** dengan mitra eksternal. Karena AS, Jepang, Quad, dan mitra lain sudah menyatakan dukungan pada centrality ASEAN, Indonesia seharusnya mendorong agar dukungan itu diterjemahkan ke kerja sama yang benar-benar kompatibel dengan AOIP—misalnya pada maritime domain awareness, cyber cooperation, energy transition, critical minerals, digital economy, dan supply chain resilience—tanpa menjadikan ASEAN sekadar kanal legitimasi bagi agenda pihak lain. Di sinilah kecakapan

diplomasi Indonesia sebagai *middle power* akan sangat menentukan.
(ASEAN)

10. Penutup

ASEAN Centrality tetap relevan justru karena Indo-Pasifik menjadi semakin ramai, semakin kompleks, dan semakin dipenuhi aktor yang tidak semuanya memiliki visi kawasan yang sama. AOIP memberi ASEAN bahasa strategis yang khas: terbuka, inklusif, transparan, berbasis aturan, dan menolak rivalitas sebagai satu-satunya cara membaca kawasan. Dokumen-dokumen ASEAN 2024–2025 menunjukkan bahwa centrality kini tidak hanya dipertahankan secara normatif, tetapi juga sedang didorong ke arah implementasi yang lebih konkret melalui AOIP mainstreaming, AIPF, blue economy, konektivitas, RCEP, dan ASEAN 2045. Namun di saat yang sama, Myanmar, Laut Cina Selatan, AUKUS, Quad, dan divergensi internal ASEAN menunjukkan bahwa centrality selalu berada dalam ujian. (ASEAN)

Dalam keseluruhan arsitektur itu, Indonesia menempati posisi yang sangat sentral. Indonesia adalah penggagas AOIP, peluncur AIPF, penghubung antara ASEAN dan berbagai mitra besar, serta salah satu sedikit negara di kawasan yang memiliki bobot politik cukup besar untuk berbicara tentang inklusivitas tanpa langsung dianggap mewakili blok tertentu. Kontinuitas garis kebijakan dari 2023 ke 2025 menunjukkan bahwa Jakarta masih memandang ASEAN-first approach sebagai cara terbaik menghadapi Indo-Pasifik baru. Dengan demikian, masa depan ASEAN Centrality dalam banyak hal juga akan sangat ditentukan oleh kemampuan Indonesia menjaga kohesi ASEAN, mendorong proyek yang nyata, dan menjembatani berbagai strategi eksternal tanpa kehilangan otonomi kawasan. (Kemlu)

Pada akhirnya, centrality tidak akan diukur dari seberapa sering istilah itu diucapkan, melainkan dari seberapa jauh ASEAN tetap menjadi meja

utama tempat arah kawasan dibahas dan ditentukan. Jika ASEAN hanya menjadi forum seremonial sementara keputusan strategis substantif pindah ke minilateral arrangements di luar dirinya, maka centrality akan menipis walau retorikanya tetap kuat. Tetapi jika Indonesia dan ASEAN berhasil mengubah AOIP menjadi kerja sama nyata yang bermanfaat bagi keamanan, konektivitas, energi, perdagangan, digitalisasi, dan pembangunan kawasan, maka ASEAN Centrality bukan hanya akan bertahan, melainkan juga menemukan bentuk barunya dalam Indo-Pasifik abad ke-21. ([ASEAN](#))

Berikut **Glosarium** dan **Daftar Pustaka (APA 7)** untuk topik “**ASEAN Centrality dan Posisi Indonesia dalam Arsitektur Indo-Pasifik Baru**” - dengan menekankan istilah-istilah yang paling penting untuk membaca AOIP, dinamika Indo-Pasifik, dan peran Indonesia, serta memilih rujukan yang terutama berasal dari dokumen resmi ASEAN dan pemerintah Indonesia, dilengkapi beberapa rujukan akademik yang relevan. ([ASEAN](#))

Glosarium

1. ASEAN Centrality

Prinsip bahwa ASEAN harus tetap berada di pusat arsitektur kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik, terutama melalui mekanisme yang dipimpin ASEAN, sehingga kawasan tidak sepenuhnya dibentuk oleh rivalitas kekuatan besar. Dalam dokumen AOIP, centrality diposisikan sebagai prinsip dasar kerja sama Indo-Pasifik. ([ASEAN](#))

2. ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP)

Dokumen strategis ASEAN yang diadopsi pada 2019 untuk mendefinisikan pendekatan ASEAN terhadap Indo-Pasifik sebagai kawasan dialog dan kerja sama, bukan rivalitas. AOIP menekankan keterbukaan, inklusivitas, transparansi, penghormatan pada hukum internasional, dan centrality ASEAN. ([ASEAN](#))

3. Indo-Pasifik

Ruang strategis yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dengan arti geopolitik, geoekonomi, dan keamanan yang makin besar. Dalam perspektif ASEAN, Indo-Pasifik dipahami sebagai kawasan yang saling terhubung dan seharusnya dikelola melalui kerja sama, bukan blok-konfrontatif. ([ASEAN](#))

4. Arsitektur kawasan yang berpusat pada ASEAN (ASEAN-centred regional architecture)

Susunan forum, norma, dan kerja sama kawasan yang menempatkan ASEAN sebagai titik temu utama dalam membangun dialog dan kerja sama regional. Deklarasi ASEAN 2024 menegaskan pentingnya arsitektur kawasan yang tetap ASEAN-centred, terbuka, inklusif, dan berbasis aturan. ([ASEAN](#))

5. ASEAN-led mechanisms

Forum-forum regional yang dipimpin atau digerakkan oleh ASEAN, seperti *East Asia Summit* (EAS), *ASEAN Regional Forum* (ARF), dan *ADMM-Plus*. Mekanisme ini merupakan instrumen utama untuk menjalankan centrality ASEAN dalam praktik diplomatik. ([ASEAN](#))

6. Inklusivitas

Prinsip bahwa kerja sama kawasan tidak boleh eksklusif atau diarahkan untuk mengucilkan pihak tertentu. AOIP dan berbagai pernyataan ASEAN menekankan bahwa Indo-Pasifik harus dikelola secara terbuka

dan inklusif agar tidak berubah menjadi arena blok yang saling berhadapan. ([ASEAN](#))

7. Tataunan berbasis aturan (rules-based regional order)

Konsep bahwa hubungan antarnegara di kawasan harus tunduk pada hukum internasional, penghormatan kedaulatan, penyelesaian damai sengketa, dan prinsip-prinsip seperti UNCLOS 1982. ASEAN secara konsisten menempatkan hal ini sebagai dasar stabilitas Indo-Pasifik. ([ASEAN](#))

8. Minilateralisme

Kerja sama yang melibatkan sejumlah kecil negara dengan agenda tertentu, biasanya lebih cepat dan lebih fokus daripada forum multilateral besar. Dalam konteks Indo-Pasifik, format seperti Quad dan AUKUS menjadi contoh minilateralism yang dapat melengkapi, tetapi juga berpotensi menekan centrality ASEAN. ([Taylor & Francis Online](#))

9. Quad

Forum strategis yang melibatkan Amerika Serikat, Jepang, India, dan Australia. Meskipun Quad menyatakan dukungan terhadap ASEAN unity and centrality, keberadaannya menunjukkan bahwa sebagian koordinasi strategis Indo-Pasifik juga berlangsung di luar mekanisme ASEAN-led. ([ASEAN](#))

10. AUKUS

Kemitraan keamanan trilateral Australia, Inggris, dan Amerika Serikat yang berfokus pada stabilitas dan keamanan Indo-Pasifik, termasuk kerja sama teknologi pertahanan. Kehadirannya sering dibaca sebagai ujian bagi kemampuan ASEAN mempertahankan centrality dalam isu keamanan kawasan. ([Taylor & Francis Online](#))

11. AIPF (ASEAN-Indo-Pacific Forum)

Forum yang diluncurkan pada masa Keketuaan Indonesia di ASEAN

tahun 2023 untuk menerjemahkan AOIP ke dalam kerja sama konkret, terutama di bidang infrastruktur hijau, rantai pasok, pembiayaan berkelanjutan, dan transformasi digital. AIPF adalah contoh upaya Indonesia mengoperasionalkan centrality. ([Sekretariat Kabinet Republik Indonesia](#))

12. Mainstreaming AOIP

Upaya memasukkan prinsip dan prioritas AOIP ke dalam kerja berbagai pilar, forum, dan proyek ASEAN sehingga AOIP tidak berhenti sebagai dokumen normatif. Dokumen ASEAN 2024 secara eksplisit mendorong pengarusutamaan AOIP ke agenda kerja ASEAN. ([ASEAN](#))

13. Blue economy

Pendekatan pembangunan yang memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan pelestarian ekosistem. Dalam konteks AOIP, *blue economy* menjadi salah satu area penting karena Indo-Pasifik adalah kawasan maritim strategis. ([ASEAN](#))

14. Hedging

Strategi negara menengah atau kecil untuk tidak sepenuhnya memihak satu kekuatan besar, melainkan menjaga hubungan dengan beberapa pihak sekaligus guna memaksimalkan ruang gerak dan mengurangi risiko. Dalam praktiknya, banyak negara ASEAN, termasuk Indonesia, kerap dibaca menjalankan pola ini dalam Indo-Pasifik. ([Taylor & Francis Online](#))

15. Posisi Indonesia sebagai de facto leader ASEAN

Gagasan bahwa Indonesia, karena ukuran, bobot diplomatik, dan kapasitas inisiatifnya, sering berperan sebagai penggerak utama arah ASEAN, termasuk dalam isu Indo-Pasifik dan AOIP. Literatur akademik

dan dokumen resmi Indonesia menunjukkan konsistensi peran ini. ([BINUS Journal](#))

Daftar Pustaka (APA 7)

Association of Southeast Asian Nations. (2019). *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*. ASEAN Secretariat.

Association of Southeast Asian Nations. (2024). *ASEAN Leaders' Declaration on the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific for the Future-Ready ASEAN and ASEAN-Centered Regional Architecture*. ASEAN Secretariat.

Association of Southeast Asian Nations. (2025). *ASEAN 2045: Our Shared Future*. ASEAN Secretariat.

Association of Southeast Asian Nations. (2025). *Chairman's Statement of the 47th ASEAN Summit*. ASEAN Secretariat.

Association of Southeast Asian Nations. (2025). *ASEAN–United States Leaders' Joint Vision Statement*. ASEAN Secretariat.

Association of Southeast Asian Nations. (2025). *Joint Statement of the 28th ASEAN-Japan Summit on Further Promotion and Implementation of the AOIP*. ASEAN Secretariat.

Association of Southeast Asian Nations. (2025). *ASEAN Statistical Highlights 2025*. ASEAN Secretariat.

Dannhauer, P. (2024). Elite role conceptions and Indonesia's agency in the making of the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. *Review of International Studies*.

Rudy C Tarumingkeng: ASEAN Centrality dan Posisi Indonesia dalam Arsitektur Indo-Pasifik Baru

Fujita, M. (2021). Can ASEAN retain centrality in Indo-Pacific region? *Journal of Current Southeast Asian Affairs*.

Indraswari, R. (2022). ASEAN centrality: Comparative case study of Indonesia's leadership in ASEAN. *Journal of ASEAN Studies*.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2025, November 21). *Menlu RI dorong ASEAN–Uni Eropa wujudkan kerja sama konkret untuk stabilitas dan kesejahteraan Indo-Pasifik*.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2025). *Joint communique: Annual Leaders' Meeting Indonesia–Australia 2025*.

Qiao-Franco, G. (2025). The Indo-Pacific and the next phase of ASEAN centrality. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2023, September 5). *Presiden Jokowi buka ASEAN-Indo-Pacific Forum*.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2023, September 15). *Implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific melalui ASEAN-Indo-Pacific Forum 2023: Kemanfaatan dan tantangan*.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2024, March 25). *Prioritas Indonesia pada masa Keketuaan Laos di ASEAN tahun 2024*.

Wong, P. (2024, July 29). *Quad Foreign Ministers' Meeting joint statement*. Department of Foreign Affairs and Trade, Australia.

Copilot for this article - Chatgpt 5.2 Thinking. Access date: 12 Maret 2026
Prompting on Writer's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69acf5b9-8798-839d-83f0-cffa92d7b98c>